

Buletin Perdana Tahun 2026



Transparansi &
Akuntabilitas Tata
Kelola Daerah

Penguatan
Pengawasan Intern &
Budaya Integritas

Optimalisasi Tindak
Lanjut Hasil
Pengawasan

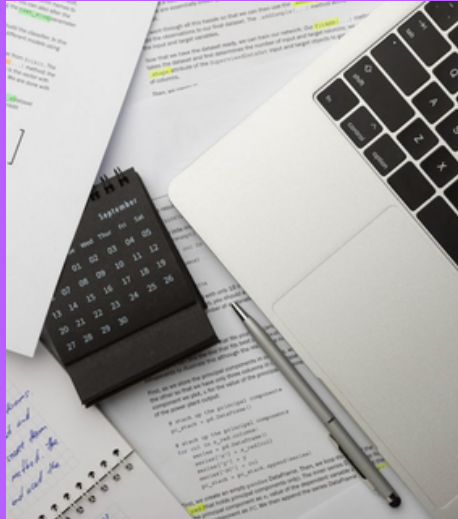
Inspektorat Daerah



Provinsi Gorontalo

<https://inspektorat.gorontaloprov.go.id/>

Daftar Isi



BAB I

- * Pendahuluan & Kerangka Kerja Kinerja

BAB II

- * Timeline Kronologis Rekapitulasi Kegiatan (Januari -Mei 2026)

BAB III

- * Rincian Pelaksanaan Rencana Aksi Periodik Per Bulan

BAB IV

- * Analisis Perkembangan dan Sintesis Akumulatif (Januari -Mei 2026)

BAB V

- * Penutup dan Rekomendasi Manajerial

BAB I: Pendahuluan & Kerangka Kerja

Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Periodik Inspektur Pembantu Wilayah IV (Irbn IV) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja serta komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang efektif, profesional, transparan, dan berintegritas. Rangkuman ini mencakup seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan dari bulan Januari sampai dengan Mei 2026 (Periode I hingga Periode V) yang disusun secara runut berdasarkan linimasa (timeline) tanpa mengurangi substansi dan pemaknaan dari setiap laporan asli.

ITDA PROV GORONTALO

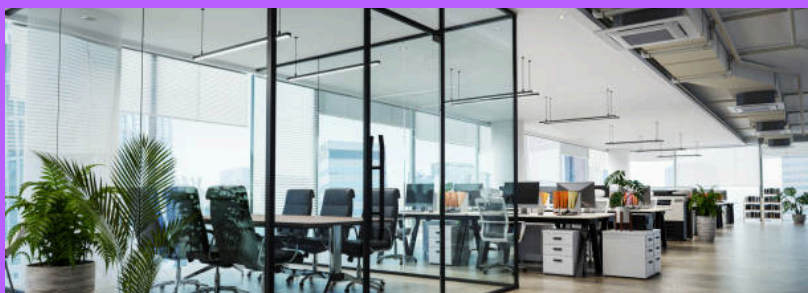


1.1 Program Utama Pengawasan

Dalam menjalankan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah IV memfokuskan pelaksanaan kinerja tahunan pada 2 (dua) program utama sebagai berikut:

1. Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pengawasan: Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur sipil negara.

2. Terlaksananya Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi: Program ini diarahkan pada penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kualitas kebijakan pengawasan, serta pemberian dukungan teknis kepada perangkat daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

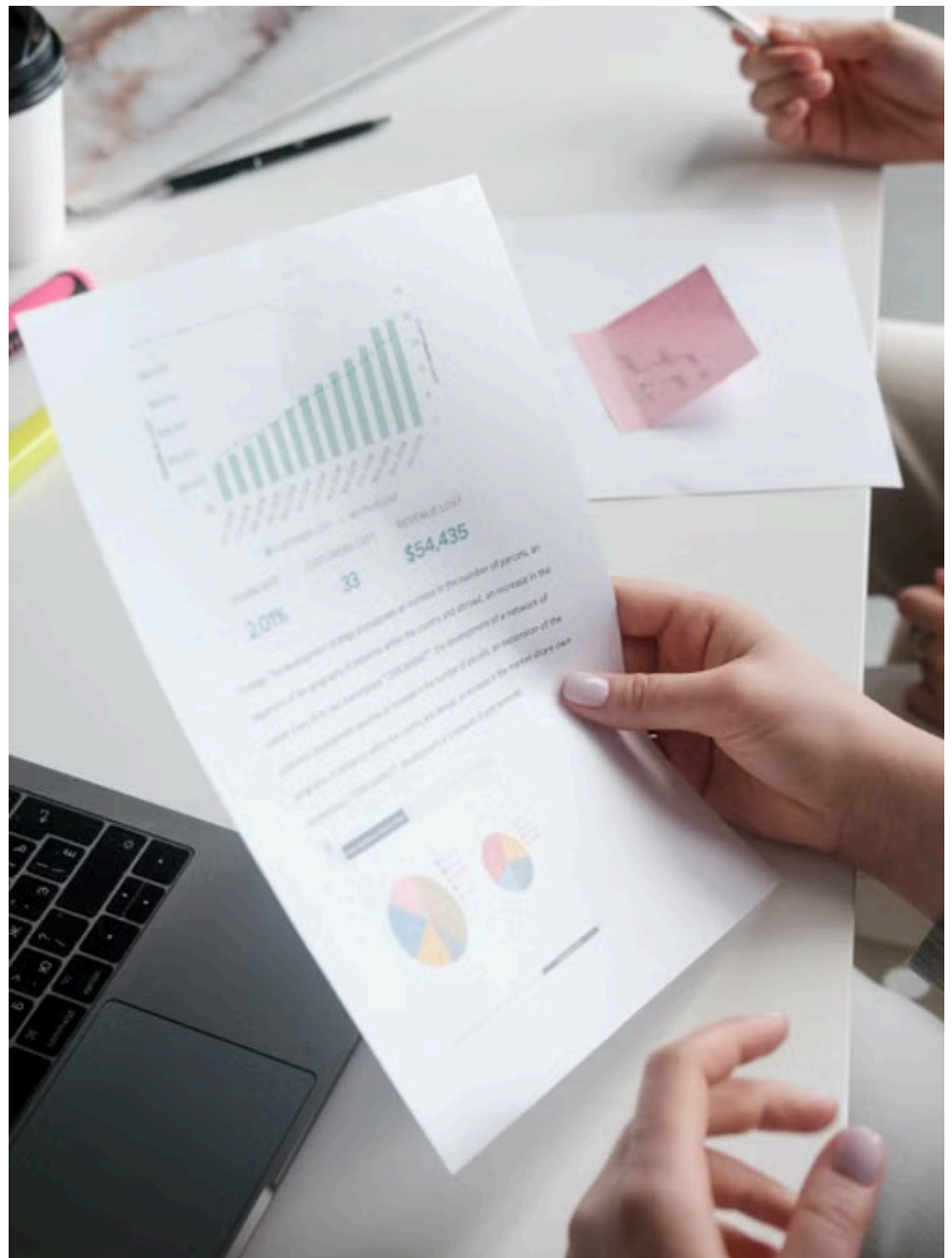


1.2 Indikator Kinerja Individu (IKI)

Pencapaian sasaran pengawasan diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Individu utama:

- **Persentase pengaduan dan perintah pimpinan yang ditindaklanjuti:** Merupakan ukuran kecepatan, ketepatan, dan kualitas respons terhadap berbagai aduan masyarakat (seperti media SP4N Lapor) maupun perintah pimpinan (direktif) yang memerlukan tindakan pengawasan secara cepat dan akurat.
- **Persentase tindak lanjut rencana aksi pencegahan korupsi dan penegakan integritas:** Merupakan wujud nyata kontribusi Irban IV dalam upaya pencegahan korupsi serta pembentukan budaya integritas secara berkelanjutan di seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Respon cepat terhadap pengaduan dan penegakan integritas adalah kunci utama pengawasan intern yang efektif.”



"Mengawal akuntabilitas melalui respon pengaduan cepat dan budaya anti-korupsi yang berkelanjutan."

1.3 Bentuk Kegiatan Strategis Rencana Aksi

Untuk merealisasikan indikator kinerja individu tersebut, pelaksanaan kegiatan dijabarkan ke dalam 3 (tiga) pilar kegiatan strategis:

1. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Melakukan pemeriksaan mendalam atas isu-isu strategis, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI, maupun tugas khusus atas dasar perintah pimpinan guna mengidentifikasi potensi penyimpangan serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret.

2. Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, dan Verifikasi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi

Ditujukan untuk memastikan seluruh perangkat daerah melaksanakan aksi pencegahan korupsi secara konsisten serta berkontribusi dalam pencapaian target-target nasional seperti Monitoring Controlling and Surveillance for Prevention (MCSP) / Indikator Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI).

3. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas

Difokuskan pada pembinaan dan penguatan nilai-nilai integritas aparatur, pemantauan kewajiban pelaporan kekayaan dan perpajakan (LHKPN dan SPT Tahunan), serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang mengandung potensi benturan kepentingan, pelanggaran etika, atau praktik yang bertentangan dengan akuntabilitas.



"Pencegahan korupsi bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata komitmen tata kelola yang bersih."

BAB II:

Timeline Kronologis

Rekapitulasi

Kegiatan

Bulan	Jenis Kegiatan	Dasar Legalitas / Surat Tugas	Objek / Pokok Bahasan	Waktu Pelaksanaan
Januari 2026 (Periode I)	Direktiv Pimpinan	Rapat Internal Irban IV	Program Kerja Pengawasan & Kendali Mutu (KM) 3 Usulan PKPT 2026	06 Januari 2026
Januari 2026 (Periode I)	Asistensi Integritas	ST No. 3/INSP.4/ST/I/2026 (06 Jan 2026)	Pemantauan Wajib Lapo LHKAN (LHKPN & SPT Tahunan TA 2025)	01 - 31 Des 2025 (Teknis Jan 2026, 22 Hari)
Januari 2026 (Periode I)	PDTT	ST No. 7/INSP.4/ST/I/2026 (22 Jan 2026)	Pertanggungjawaban Keuangan TA 2025 Biro Hukum Setda Prov. Gorontalo	26 Jan - 25 Feb 2026 (22 Hari Kerja)
Februari 2026 (Periode II)	Direktiv Pimpinan	Rapat Internal Irban IV	Pembahasan Draf Pedoman Telah Sejawat (Peer Review)	03 Februari 2026
Februari 2026 (Periode II)	Direktiv Pimpinan	Koordinasi Lintas OPD	Penyusunan Data Terpadu Tata Kelola Perkebunan Sawit (Atensi KPK)	05 Februari 2026
Februari 2026 (Periode II)	Asistensi Integritas	ST Tambahan Hari No. 16/ INSP.4/ST/I/2026 (05 Feb 2026)	Perpanjangan Pemantauan LHKAN & SPT Tahunan Orang Pribadi TA 2025	05 - 28 Februari 2026 (16 Hari Tambahan)
Februari 2026 (Periode II)	Direktiv Pimpinan	Surut Deputi KPK No. B/ 694/KSP.00/70-75/02/2026	Rapat Atensi Tindak Lanjut Koordinasi Pemberantasan Korupsi 2025 (Sawit & MCSP)	18 Februari 2026
Februari 2026 (Periode II)	PDTT Rekomendasi BPK	ST No. 21/INSP.4/ST/II/ 2026 (20 Feb 2026)	Pemeriksaan Pengelolaan Belanja Daerah TA 2024-2025 Sekretariat DPRD (Rp81,21 Juta)	23 Feb - 31 Mar 2026 (22 Hari Kerja)

Bulan	Jenis Kegiatan	Dasar Legalitas / Surat Tugas	Objek / Pokok Bahasan	Waktu Pelaksanaan
Februari 2026 (Periode II)	PDTT Rekomendasi BPK	ST No. 23/INSP4/ST/II/2026 (20 Feb 2026)	Pemeriksaan Denda Keterlambatan Penyedia Pekerjaan di Dinas PUPR-PKP TA 2024-2025	23 Feb - 31 Mar 2026 (22 Hari Kerja)
Maret 2026 (Periode III)	Direktif Pimpinan	Undangan Komisi I DPRD Prov. Gorontalo	Rapat Kerja Pembahasan TL LHP BPK TA 2024 di Ruang Inogaluma DPRD	09 Maret 2026 (11.00 WITA)
Maret 2026 (Periode III)	Direktif Pimpinan	Rapat Koordinasi KPK-RI (Zoom)	Persiapan Bimbingan Teknis Antikorupsi (Keluarga, Perempuan, Dunia Usaha)	12 Maret 2026 (10.00 WITA)
April 2026 (Periode IV)	PDTT / Audit PKKN	ST No. 57/INSP4/ST/IV/2026 (06 Apr 2026) & Surat Kejati No. B-477/P5/Fd. 1/03/2026	Audit PKKN Dugaan Tipikor Dana Hibah KONI TA 2024 (PON Aceh-Sumut)	06 - 30 April 2026 (19 Hari Kerja)
April 2026 (Periode IV)	PDTT Rekomendasi BPK	ST No. 62/INSP4/ST/IV/2026 (07 Apr 2026) & LHP BPK No. 1/T/LHP/DJPKN-VLGOR/PPD.03/01/2026	PDTT Belajar Peralatan Mesin & Makan Minum Badan Keuangan TA 2024-2025	08 Apr - 07 Mei 2026 (22 Hari Kerja)
April 2026 (Periode IV)	Direktif Pimpinan	Rapat Koordinasi KPK-RI (Zoom)	Pernyataan Teknis & Finalisasi Peserta Bimtek Antikorupsi Mei 2026	23 April 2026 (10.00 WITA)
Mei 2026 (Periode V)	Pelaksanaan Bimtek	Kerja sama KPK-RI & Pemprov Gorontalo	Penyelenggaraan Bimtek Dunia Usaha, Keluarga Berintegritas, & Perempuan Berintegritas	19 - 21 Mei 2026

BAB III: Rincian Pelaksanaan Rencana Aksi Periodik Perbulan



"INTEGRITAS ADALAH MELAKUKAN HAL YANG BENAR, BAHKAN KETIKA TIDAK ADA MATA YANG MENGAWASI."

JANUARI 2026 (PERIODE I)

- PDTT Biro Hukum Setda: Tindak lanjut cepat aduan masyarakat via SP4N Laporan atas Pertanggungjawaban Keuangan TA 2025 (ST No. 7/INSP.4/ST/I/2026, 26 Jan–25 Feb 2026).
- Pemantauan LHKAN: Verifikasi kepatuhan LHKPN & SPT Tahunan PPh TA 2025 bagi seluruh OPD dan SMA/SMK/MA/SLB se-Gorontalo (ST No. 3/INSP.4/ST/I/2026).
- Direktif Pimpinan: Rapat perdana Irban IV membahas Usulan PKPT 2026, dokumen Kendali Mutu (KM) 3, dan mitigasi risiko pengawasan.

FEBRUARI 2026 (PERIODE II)

- PDTT LHP BPK RI:
 - Sekretariat DPRD: Pemeriksaan temuan pengelolaan belanja daerah Rp81,21 juta (ST No. 21/INSP.4/ST/II/2026, 23 Feb–31 Mar 2026).
 - Dinas PUPR-PKP: Audit denda keterlambatan proyek fisik/konstruksi (ST No. 23/INSP.4/ST/II/2026, 23 Feb–31 Mar 2026).
- Perpanjangan LHKAN: Penambahan waktu pemantauan SPT Tahunan hingga 28 Feb 2026 sesuai edaran KPP Pratama (ST No. 16/INSP.4/ST/I/2026).
- Direktif & Atensi KPK:
 - Pembahasan draf Pedoman Telaah Sejawat (Peer Review).
 - Rapat Data Terpadu Perkebunan Sawit Pohuwato (kewajiban plasma & kebutuhan SDM PUP).
 - Pemenuhan dokumen 8 Area IPKD MCSP KPK-RI.

MEI 2026 (PERIODE V)

- Penuntasan PDTT: Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) rahasia untuk Badan Keuangan Prov. Gorontalo.
- Puncak Bimtek Antikorupsi KPK-RI (19–21 Mei 2026):
 - Dunia Usaha: Mendorong iklim bisnis bersih (BUMN, BUMD, UMKM, KADIN/HIPMI, Koperasi).

MARET 2026 (PERIODE III)

- Penuntasan PDTT: Finalisasi pengujian bukti audit BPK di Sekretariat DPRD dan Dinas PUPR-PKP.
- Sinergi Legislatif & KPK:
 - Rapat Komisi I DPRD: Akselerasi penyelesaian tindak lanjut LHP BPK TA 2024 oleh OPD.
 - Rakor Zoom KPK-RI: Persiapan teknis penyelenggaraan Bimtek Antikorupsi 3 sasaran (Keluarga, Perempuan, & Dunia Usaha).

APRIL 2026 (PERIODE IV)

- Audit PKKN KONI Gorontalo: Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas permohonan Kejati Gorontalo terkait dugaan Tipikor Dana Hibah KONI TA 2024 (PON XXI Aceh-Sumut) (ST No. 57/INSP.4/ST/IV/2026).
- PDTT Badan Keuangan: Audit Rekomendasi BPK atas pengadaan komputer jaringan dan belanja makan minum (ST No. 62/INSP.4/ST/IV/2026, 8 Apr–7 Mei 2026).
- Direktif Pimpinan: Finalisasi penetapan target peserta & jadwal Puncak Bimtek Antikorupsi KPK-RI.
 - Keluarga Berintegritas: Pencegahan korupsi skala keluarga wajib bagi seluruh Pejabat Eselon II & Pasangan.
 - Perempuan Berintegritas: Penguatan peran wanita (PKK, DWP, LSM) dalam menyuarkan transparansi.

BAB IV: Analisis Perkembangan dan Sintesis Akumulatif

"PENGAWASAN TERBAIK DIMULAI DARI KEJUJURAN PADA DIRI SENDIRI."

4.1 Tren dan Esalasi Kegiatan Pengawasan (PDTT)

Selama periode Januari hingga Mei 2026, Irban IV telah menangani 5 (lima) objek Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) utama dengan cakupan yang meluas:

- Januari - Februari: Penanganan aduan masyarakat SP4N Lapor terkait akuntabilitas keuangan internal (Biro Hukum Setda).
- Februari - Maret: Pengawalan tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas Pengelolaan Belanja Daerah TA 2024-2025 di Sekretariat DPRD (Rp81,21 Juta) dan penagihan Denda Keterlambatan di Dinas PUPR-PKP.
- April - Mei: Penanganan isu strategis penegakan hukum melalui Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas permohonan Kejaksaan Tinggi Gorontalo (Dugaan Tipikor Hibah KONI PON Aceh-Sumut TA 2024) serta PDTT Belanja Pengadaan Komputer Jaringan dan Makan Minum di Badan Keuangan.





4.2 Penguatan Pencegahan Korupsi & Sinergi Lembaga (KPK & BPK)

Pengawasan yang dilakukan Irban IV tidak hanya bersifat represif/auditif, tetapi sangat dominan pada upaya preventif dan kolaboratif:

Sinergi KPK-RI

Berhasil mengkonsolidasikan data terpadu perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pohuwato/Provinsi Gorontalo, pemenuhan dokumen 8 Area MCSP/IPKD 2025, pemantauan LHKPN/SPT Tahunan, serta sukses menyelenggarakan Bimtek Antikorupsi Lintas Sektor (Dunia Usaha, Executive Family, dan Perempuan) pada Mei 2026.

Sinergi BPK-RI & DPRD

Memastikan setiap LHP Kepatuhan Belanja Daerah TA 2024-2025 ditindaklanjuti secara patuh oleh OPD melalui rapat kerja bersama Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.

4.3 Integrasi Bukti Dukung Digital (QR Code Tracking)

Setiap periode laporan dilengkapi dengan sistem verifikasi bukti dukung digital berupa QR Code link resmi untuk menjamin transparansi data:

- Periode I (Januari 2026): Tautan Bukti Dukung Digital Jan 2026
- Periode II (Februari 2026): Tautan Bukti Dukung Digital Feb 2026
- Periode III (Maret 2026): Tautan Bukti Dukung Digital Mar 2026
- Periode IV (April 2026): Tautan Bukti Dukung Digital Apr 2026
- Periode V (Mei 2026): Tautan Bukti Dukung Digital Mei 2026

BAB V: Penutup dan Rekomendasi Manajerial

5.1 Kesimpulan

Rangkaian pelaksanaan Rencana Aksi Periodik Inspektur Pembantu Wilayah IV dari bulan Januari sampai dengan Mei 2026 telah terlaksana secara optimal, akuntabel, dan sesuai dengan target Indikator Kinerja Individu (IKI) yang ditetapkan. Seluruh aduan masyarakat, tindak lanjut LHP BPK RI, permintaan audit APH (Kejaksaaan Tinggi), serta direktif pimpinan dan koordinasi KPK-RI telah direspon secara profesional tanpa ada substansi yang terabaikan.



5.2 Rekomendasi Langkah Lanjut

- Mempertahankan Kecepatan Respons PDTT: Mengawal penerbitan LHP rahasia untuk audit PKKN KONI Gorontalo dan PDTT Badan Keuangan agar rekomendasi perbaikan segera dieksekusi.
- Penguatan Sistem Data Sawit Terpadu: Menindaklanjuti secara konsisten pembentukan SDM Petugas Penilai Usaha Perkebunan (PUP) serta penyelesaian kewajiban kebun plasma masyarakat di Kabupaten Pohuwato.
- Pasca-Bimtek Antikorupsi: Melakukan monitoring dampak (impact assessment) atas pelaksanaan Bimtek KPK-RI terhadap budaya kerja OPD dan kemitraan dunia usaha di Provinsi Gorontalo.

"Menjaga integritas bukan tentang menghindari sanksi, tapi tentang merawat kepercayaan publik."



ITDA PROV GORONTALO

INSPEKTORAT.GORONTALOPROV.GO.ID